

Sistem Pendidikan Hindia Belanda Pada Masa Kebijakan Politik Etis

Habib Akbar Nurhakim¹, Fahrudin^{2*}.

Universitas PGRI Yogyakarta

Email: habibnurha@gmail.com, fahrudin@upy.ac.id

Abstract: *This article aims to discuss the education system of the Dutch East Indies during the Ethical Policy Period. The method used or applied by researchers here is the historical method or historical research, which consists of 5 stages, namely topic selection, heuristics (source gathering), source verification/criticism (internal and external), interpretation/interpretation (analysis and synthesis), and finally is historiography (writing history). The results of this study indicate that the education system that had been developed and implemented by the Dutch colonial government at that time was neatly arranged and structured, as evidenced by the existence of a basic, advanced, and high school or college education system. Of course this is a modern education system that has never been implemented before. However, on the other side of the positive impact, of course there are also negative impacts, namely the purpose of this policy is for the benefit of the Dutch themselves. But as a whole, this policy or system can bring the Dutch East Indies indigenous people to progress, develop, and quality.*

Keywords : *Education System, Dutch East Indies, Ethical Politics*

Abstrak : Artikel ilmiah ini bertujuan untuk membahas sistem pendidikan Hindia Belanda pada masa Kebijakan Politik Etis. Metode yang digunakan atau diaplikasikan oleh peneliti disini adalah metode historis atau penelitian sejarah, yang terdiri dari 5 tahapan, yakni pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi/kritik sumber (intern dan ekstern), interpretasi/penafsiran (analisis dan sintesis), dan terakhir adalah historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang telah disusun dan diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda kala itu sudah tersusun secara rapi dan terstruktur, yang dibuktikan dengan adanya sistem pendidikan dasar, lanjutan, dan sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Tentu ini merupakan suatu sistem pendidikan modern yang sebelum-sebelumnya belum pernah diterapkan. Namun, disisi lain dampak positif tersebut dampak negatif juga tentu ada, yakni tujuan dari adanya kebijakan ini adalah demi keuntungan pihak Belanda sendiri. Namun secara hampir keseluruhan, kebijakan atau sistem ini dapat membawa masyarakat pribumi Hindia Belanda menjadi maju, berkembang, serta berkualitas.

Kata kunci : Sistem Pendidikan, Hindia Belanda, Politik Etis

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu sarana bagi manusia untuk dapat berusaha menjadi orang yang terdidik guna mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana pendapat dari Dwianti et al (2021: 675), bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang dapat ditempuh atau dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain, bangsa, dan negara. Pendidikan juga memiliki berbagai macam komponen-komponen yang pada akhirnya membentuk suatu sistem pendidikan. Sistem pendidikan tersebut juga lahir dengan berbagai faktor kondisi masyarakat, termasuk kesejahteraan masyarakat, yakni ekonomi, sosial, dan politik (Fakhriansyah & Patoni, 2019: 123). Kondisi dari kesejahteraan masyarakat tersebut juga tentu dipengaruhi oleh berbagai kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

Mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat, Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai macam dinamika sosial, politik, dan ekonomi, termasuk pada abad ke-19. Pada abad ini, ketika waktu itu masih bernama Hindia Belanda, yang pernah menjadi tempat bagi diberlakukannya Sistem Tanam Paksa atau *Cultuur Stelsel*. Sistem ini membuat kondisi masyarakat kala itu menjadi amat memprihatinkan, karena sistem tersebut hanya bersifat menguntungkan pihak Pemerintah Kolonial Belanda saja dengan terpenuhinya uang kas Belanda kembali. Sedangkan rakyat menderita miskin, terutama kelompok petani yang menjadi sasaran utama bagi Pemerintah Kolonial Belanda dalam pelaksanaan sistem tersebut (Putra, 2019: 19). Kondisi inilah yang sebenarnya nantinya akan menggugah para kelompok-kelompok *humanis* Hindia Belanda dan Belanda yang pada

kemudian hari akan menjadi pahlawan bagi masyarakat Hindia Belanda untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan.

Melihat dari permasalahan-permasalahan diatas atau pada abad ke-19, golongan *humanis* Belanda kemudian memiliki sebuah rasa keprihatinan yang kemudian turut andil untuk membantu rakyat Hindia Belanda untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan. Mereka berpikir bahwa Pemerintah Kolonial Belanda hendaknya tidak seterusnya memberlakukan sistem yang membuat rakyat menderita, namun juga perlu membuat suatu sistem atau kebijakan dimana rakyat Hindia Belanda dapat bernafas segar atau mendapatkan kesejahteraan. Tokoh-tokoh *humanis* Belanda terkemuka yang kemudian membantu menyuarakan suara rakyat Hindia Belanda yakni C.T. Van Deventer, Pieter Brooshooft, dan Van Kol. Usaha Van Kol ialah ia kerap melontarkan kritikan kepada pemerintah karena ia menganggap bahwa kemerosotan atau penderitaan rakyat Hindia Belanda adalah disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kemanusiaan (Kartodirdjo et al., 1975: 35). Kemudian dari golongan *humanis* Hindia Belanda adalah Douwes Dekker yang mengkritik Pemerintah Kolonial Belanda melalui tulisan *Max Havelaar* yang menjelaskan mengenai penderitaan rakyat karena Belanda.

Sementara itu, pada tahun 1888 Pieter Brooshooft juga turut membantu menyuarakan suara hati rakyat kepada pemerintah, khususnya kepada mereka yang memegang atau duduk pada jabatan-jabatan pemerintah yang memiliki pengaruh besar melalui redaksi surat kabar di Semarang, yakni *De Locomotief* mengenai perbaikan sosial, ekonomi masyarakat Hindia Belanda (Brooshooft, n.d.). Tulisan-tulisan yang berisikan kritikan kepada pemerintah tersebut pada akhirnya memuncak

pada tahun 1899 dengan terbitnya tulisan C.T. Van Deventer yang berjudul *Een Eeerschuld* atau "Suatu Hutang Kehormatan" di dalam Majalah *De gids* yang berisikan bahwa sesungguhnya semua hasil eksploitasi yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda merupakan sebuah hutang kepada Hindia Belanda, dan hendaknya pemerintah membayar semua hutang tersebut dengan keuangan negara (Kartodirdjo et al., 1975: 36). Dalam hal lain juga dapat menerapkan kebijakan kesejahteraan bagi masyarakat Hindia Belanda.

Atas berbagai kritikan tersebut, akhirnya sampai pada Kerajaan Belanda yang ketika itu di perintah oleh Ratu Wilhelmina yang kemudian mulai memikirkan kondisi rakyat Hindia Belanda yang mengalami penderitaan. Ratu Wilhelmina menyampaikan gagasannya dalam suatu pidato bahwa "*Nedherland sebagai suatu pemerintahan yang berkuasa di Hindia Belanda, hendaknya lebih dapat memperhatikan kondisi rakyatnya, dengan meringankan berbagai macam kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah*". Sekaligus dalam pidatonya tersebut, Ratu Wilhelmina menggagas perlunya diterapkan suatu sistem yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Hindia Belanda, yakni Sistem Kebijakan Politik Etis yang kemudian sistem ini secara resmi diberlakukan pada tanggal 17 September 1901 (Nasution, 1983: 15).

Politik Etis ini memiliki tiga program, yakni irigasi, imigrasi, dan edukasi (Sumanto & F.X, 1983: 38–39). Dari ketiga program ini ada satu program yang diutamakan atau menjadi program pokok, yakni bidang edukasi atau pendidikan (Yudi, 2012: 142). Program edukasi atau pendidikan ini menjadi sebuah program pokok karena diharapkan dari program ini dapat meluluskan para generasi terdidik yang nantinya dapat

bekerja menjadi pegawai-pegawai perusahaan atau dapat menjadi pejabat untuk membantu pemerintah. Adapun sistem pendidikan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada masa Politik Etis ini yakni, pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, dan pendidikan tinggi (Hendri, 2017). Dalam setiap jenjangnya, tentu ada beberapa jenis sekolah-sekolah yang berlaku saat itu. Secara lengkap dan detailnya mengenai sistem pendidikan ini akan dijelaskan pada bagian pembahasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis atau sejarah. Menurut Jayusman & Shavab (2021: 84), bahwa metode historis merupakan suatu metode yang berusaha untuk menyusun kembali suatu kejadian atau peristiwa sejarah masa lalu secara terstruktur dalam bentuk sebuah tulisan yang jelas dan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah. Adapun menurut Kuntowijoyo (2013), metode penelitian sejarah terdiri dari 5 tahapan, yakni pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber sejarah, verifikasi atau kritik sumber sejarah, interpretasi atau penafsiran, serta historiografi atau penulisan sejarah. Dalam penelitian sejarah tentu harus melalui kelima tahapan tersebut untuk dapat menghasilkan suatu tulisan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setiap tahapan tersebut juga tentunya memiliki penjelasannya masing-masing.

Pertama, pemilihan topik. Karena penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka topik yang akan dibahas adalah topik yang berkaitan atau berhubungan dengan kesejarahan. Hal ini selaras dengan pendapat Kuntowijoyo (2013: 70), bahwa hendaknya topik dalam penelitian sejarah memiliki unsur sejarah, sehingga dapat diteliti

kesejarahannya. Topik yang di usung oleh peneliti di sini adalah “Sistem Pendidikan Hindia Belanda Pada Masa Kebijakan Politik Etis”. Peneliti meninjau atau menggali mengenai Kebijakan Politik Etis khususnya sistem pendidikan atau edukasinya dengan perspektif kesejarahannya, atau menggali sejarah sistem pendidikan pada zaman Kebijakan Politik Etis tersebut diberlakukan serta diterapkan di Hindia Belanda. Peneliti menfokuskan pada bidang sistem pendidikan tersebut dan berusaha untuk tidak keluar dari topik pembahasan.

Kedua, heuristik atau pengumpulan sumber. Peneliti disini mengumpulkan berbagai sumber-sumber tertulis berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan surat kabar yang berhubungan dengan topik penelitian. Peneliti disini juga tidak menggunakan sumber primer, dikarenakan keterbatasan waktu, sehingga peneliti hanya menggunakan sumber sekunder namun tetap dapat dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, verifikasi atau kritik sumber sejarah. Tahap ini dilakukan dengan mengkritik atau lebih mencermati lagi mengenai sumber-sumber yang telah di dapat dari tahap sebelumnya atau heuristik. Terdapat 2 macam kritik dalam tahap ini, yakni kritik intern dan ekstern. Kritik intern dilakukan untuk menguji keakuratan atau keaslian sumber sejarah dari segi isinya, sedangkan kritik ekstern menguji keaslian sumber dari segi fisik sumber tersebut (Alian, 2012: 11). Setelah menguji atau mengkritik sumber, maka lanjut ke tahap selanjutnya.

Keempat, interpretasi atau penafsiran. Tahap ini merupakan penafsiran peneliti dalam mengolah data-data atau sumber sejarah. Penafsiran atas semua sumber-sumber sejarah tersebut tentu harus bersifat objektif atau sesuai dengan fakta yang sebenarnya (Susilo & Isbandiyah,

2018: 406). Interpretasi terdiri analisis dan sintesis. Analisis berarti peneliti berusaha untuk menguraikan sumber-sumber yang telah di dapat dan sudah teruji, sedangkan sintesis menyatukan atau menggabungkan Kuntowijoyo (2013). Penafsiran pada penelitian ini dilakukan dengan menguraikan sumber-sumber sejarah kemudian mencari hubungan dan keterkaitannya serta menyatukannya agar terbentuk suatu tulisan dengan makna yang utuh. Hal ini sebagaimana pendapat Fahrudin & Nurhakim (2022: 4), bahwa proses dari analisis dan sintesis adalah mengkaitkan berbagai sumber sejarah agar terbentuk suatu tulisan yang memiliki makna utuh. *Kelima*, historiografi atau penulisan sejarah. Penulisan sejarah hendaknya lebih mengedepankan atau harus memenuhi aspek kronologis, atau berurutan waktu kejadian sebuah peristiwa (Kuntowijoyo, 2013). Peneliti di sini berusaha untuk memenuhi aspek tersebut, sehingga bisa di cermati dalam setiap tulisan dalam artikel ini yang membahas secara berurutan waktunya mengenai “Sistem Pendidikan Hindia Belanda Pada Masa Kebijakan Politik Etis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa sistem pendidikan terdiri dari beberapa komponen, yang kemudian tersusun menjadi satu kesatuan sistem pendidikan yang berjenjang. Jenjang pendidikan pada masa Kebijakan Politik Etis ini terdiri dari tiga jenjang, yakni pendidikan dasar, pendidikan lanjutan atau sambungan, dan pendidikan tinggi atau sekolah tinggi. Sistem pendidikan yang sudah tersusun tersebut juga tentu tidak lepas dari faktor keadaan masyarakat Hindia Belanda sendiri, khususnya faktor dari golongan, apakah mereka bangsawan ataukah dari golongan bawah/rakyat kecil. Golongan

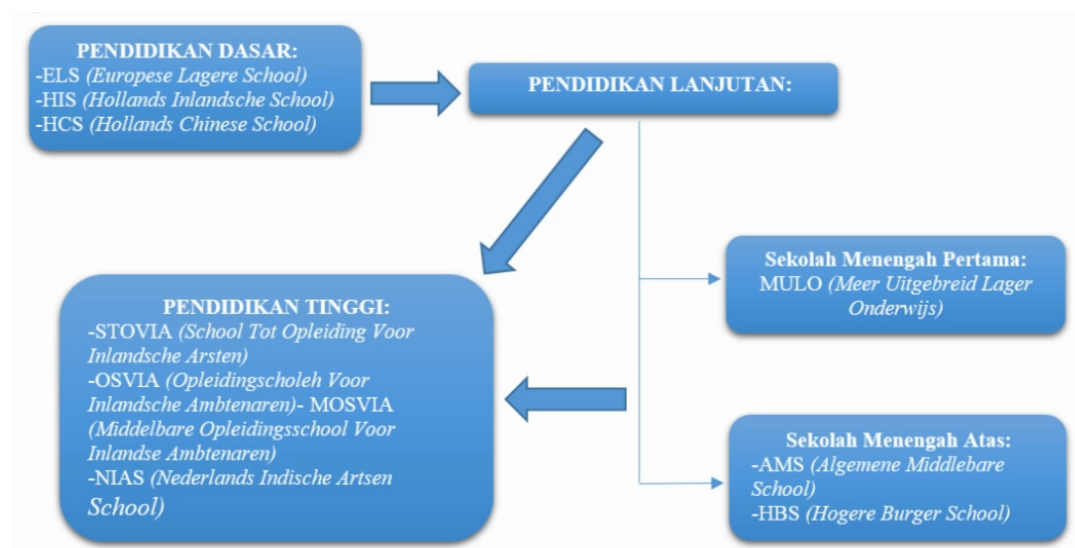
bangsawan cenderung mendapat pendidikan yang bermutu baik, sedangkan golongan bawah mendapat pendidikan yang sekedar mereka mendapat pendidikan saja tanpa memperhatikan mutu atau tidaknya. Kemudian dari berbagai golongan tersebut juga tentu dapat dilihat atau ditinjau dari segi perekonomian mereka, golongan bangsawan cenderung memiliki perekonomian yang baik dan terjamin, sedangkan golongan bawah memiliki perekonomian yang rendah. Kondisi inilah yang membuat pemerintah waktu itu membagi sekolah menjadi beberapa golongan/jenis-jenis sekolah.

Meninjau dari faktor-faktor atau kondisi tersebut menjadikan pemerintah membagi jenis sekolah menjadi dua jenis, yakni Sekolah Kelas I (*Sekolah Ongko Siji*), dan Sekolah Kelas II (*Sekolah Ongko Loro*). Sekolah Kelas I diperuntukkan bagi mereka dari golongan bangsawan atau orang terkemuka, sedangkan Sekolah Kelas II diperuntukkan bagi mereka dari golongan bawah, atau rakyat/masyarakat umum. Menurut Nasution (1983: 50–52), Sekolah Kelas I menggunakan kurikulum sekolah sebelum tahun 1892 yang pembelajarannya terdiri dari membaca, menulis, berhitung, namun kemudian pada tahun 1907 mulai dimasukkan mata pelajaran Bahasa Belanda. Kemudian pada tahun 1912, sekolah ini berubah menjadi HIS (*Hollands Inlandse School, sekolah khusus pribumi*). Hal ini sebenarnya juga sama dengan tulisan Djumhur & Danasuparta (1974: 135), bahwa Sekolah Kelas I ini memang kemudian berubah menjadi HIS (*Hollands Inlandse School*) dan tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan kala itu.

Adapun untuk Sekolah Kelas II kurikulumnya disusun lebih rendah dari pada Sekolah Kelas I, yakni kurikulum yang hanya berisikan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung, dan juga diberikan

pembelajaran Bahasa Melayu dan bahasa daerah guna untuk berkomunikasi (Gouda, 2007: 142). Perbedaan dari keduanya sangat tampak sekali bahwa Belanda membuat sistem pendidikan sesuai dengan kondisi masyarakat yang telah dijelaskan sebelumnya, namun terkadang kita juga perlu berpikir apakah jenis sekolah-sekolah yang telah diciptakan serta diberlakukan tersebut juga mempengaruhi hasil lulusan masyarakat kala itu atau apakah setiap jenis sekolah misalkan Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II memiliki perbedaan kualitas lulusan peserta didiknya atau apakah setiap generasi terpelajar kebanyakan lahir dari mereka yang lulusan dari Sekolah Kelas I? Pertanyaan itu hanya dapat kita jawab ketika kita benar-benar mengetahui macam-macam sekolah serta bagaimana sistem mata pelajarannya, lama belajarnya, murid-muridnya yang kemudian hal-hal tersebut mempengaruhi setiap lulusan-lulusannya.

Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang telah didapat dan dianalisis oleh peneliti, secara garis besar dapat dibentuk sebuah bagan sistem pendidikan Hindia Belanda pada masa Kebijakan Politik Etis, yakni sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Sistem Pendidikan Hindia Belanda Pada Masa Kebijakan Politik Etis

Dalam jenjang pendidikan dasar, terdiri dari tiga sekolah, yakni ELS (*Europese Lagere School*), HIS (*Hollands Inlandsche School*), HCS (*Hollands Chinese School*). Ketiga sekolah tersebut menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda. Kemudian pendidikan lanjutan terdiri dari pendidikan umum seperti MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), AMS (*Algemene Middlebare School*) dan HBS (*Hogere Burger School*). Serta terakhir ada pendidikan tinggi atau sekolah tinggi (Hendri, 2017). Sekolah-sekolah tersebut memiliki kriteria seperti syarat peserta didiknya, mata pelajaran-mata pelajarannya, fokus pendidikan, serta lulusan-lulusannya bisa melanjutkan kemana saja itu ada penjelasannya masing-masing.

Mengenai pendidikan dasar. *Pertama* ELS (*Europese Lagere School*). Bahasa pengantar yang digunakan disekolah ini merupakan Bahasa Belanda (Hendri, 2017). Sekolah ini berdiri pada tahun 1818 dan diperuntukkan bagi orang-orang Eropa, Bumiputra, dan juga orang-orang keturunan timur. Lama pendidikan sekolah ini yakni tujuh tahun (Wiranata et al., 2018). Awal mula pendirian sekolah ini berawal dari ketidakinginan atau ketidakpuasan para orang tua dari anak-anak mereka, yakni anak-anak Belanda yang sistem pendidikan atau sekolahnya dicampur dengan anak-anak dari golongan rendah yang juga pada saat itu muncul sekolah-sekolah dengan guru yang tidak berkualitas serta kondisi dari siswa-siswinya yang mempunyai latar belakang yang tidak baik (Nasution, 1983: 92). Pemerintah yang kala itu memperhatikan kondisi tersebut, akhirnya mendirikan ELS (*Europese Lagere School*) guna mengatasi permasalahan ketidakinginan atau ketidakpuasan para orang tua dari anak-anak Belanda agar mereka tidak mengirimkan kembali anak-anak mereka ke negeri asalnya (Fakhriansyah & Patoni (2019: 133). Murid-murid yang berhasil

lulus dari sekolah ini dapat lanjut ke HBS (*Hogere Burger School*) (Fahrozy et al., 2022: 3096).

Kedua, HIS (*Hollands Inlandsche School*). Sekolah ini didirikan oleh pemerintah pada tahun 1914 (Wiranata et al., 2018). HIS ini didirikan untuk keperluan anak-anak dari kalangan atas. Sekolah ini menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda. Lama belajar di sekolah ini adalah tujuh tahun dan murid-muridnya memiliki kemampuan yang pandai serta mempunyai orang tua dengan perekonomian yang baik dan mampu dapat melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya yang pertama, yakni ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), kemudian bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan lagi, yakni AMS (*Algemene Middlebare School*) (Kartodirdjo et al., 1975: 125). Hal ini juga sama dengan sumber dari artikel jurnal yang ditulis Fahrozy, dkk, bahwa lulusan dari HIS dapat melanjutkan ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) atau Sekolah Menengah Pertama selama tiga tahun, baru berlanjut lagi ke AMS (*Algemene Middlebare School*) atau setara Sekolah Menengah Atas selama tiga tahun juga (Fahrozy et al., 2022: 3096).

Ketiga, HCS (*Hollands Chinese School*). Sekolah ini didirikan pada tahun 1908 dengan bahasa pengantarnya Bahasa Belanda. Sekolah ini didirikan dan diperuntukkan bagi anak-anak China. Lama belajar disekolah ini yakni selama tujuh tahun (Djumhur & Danasuparta, 1974: 146). Hal ini juga sama sebagaimana penjelasan dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Wiranata, dkk, bahwa HCS (*Hollands Chinese School*) ini didirikan pada tahun 1908 untuk menjadi wadah bagi orang-orang timur asing khususnya keturunan orang-orang China (Wiranata et al., 2018). Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ini terdiri dari membaca, menulis, berhitung, Bahasa Belanda, ilmu-ilmu alam seperti ilmu ilmu hewan, ilmu

bumi, kemudian juga ilmu sejarah dari Belanda dan Hindia Belanda, serta keterampilan-keterampilan lain seperti menggambar dan juga menyanyi (Aan, 1903: 12). Sama seperti sekolah-sekolah sebelumnya, lulusan dari sekolah ini dapat melanjutkan ke MULO dan juga bisa melanjutkan lagi ke AMS.

Kemudian terdapat pendidikan lanjutan, yakni *pertama* adalah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Sekolah ini didirikan oleh pemerintah pada tahun 1914 (Djumhur & Danasuparta, 1974: 137). MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) ini tergolong menjadi Sekolah Menengah Pertama yang memiliki lama belajar selama tiga tahun. Murid-murid yang bersekolah disini merupakan lulusan-lulusan dari sekolah ELS (*Europese Lagere School*), HIS (*Hollands Inlandsche School*), dan juga HCS (*Hollands Chinese School*). Lulusan-lulusan dari sekolah ini dapat melanjutkan lagi ke AMS (*Algemene Middlebare School*) atau bisa juga ke HBS (*Hogere Burger School*) yang setingkat Sekolah Menengah Atas (Jannah et al., 2018: 136).

Kedua, AMS (*Algemene Middlebare School*). Sekolah ini didirikan pada tahun 1915 dengan bahasa pengantarnya Bahasa Belanda dan diperuntukkan bagi orang-orang Timur asing dan juga golongan bumiputra (Sultani & Kristanti, 2020). Adapun pendirian sekolah ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi pemuda-pemuda Hindia Belanda agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi setelah mereka lulus dari MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Pada zaman Jepang, sekolah ini bernama Sekolah Menengah Tinggi dan kemudian pada saat Indonesia sudah merdeka, sekolah ini disebut Sekolah Menengah Atas. Lama belajar disekolah ini selama tiga tahun dan mereka yang lulus dari sekolah ini dapat melanjutkan ke

sekolah-sekolah tinggi atau ke perguruan tinggi (Djumhur & Danasuparta, 1974: 138).

Ketiga, HBS (Hogere Burger School). Sekolah ini merupakan Sekolah Menengah Atas yang didirikan pada tahun 1860 (Sultani & Kristanti, 2020). Sekolah ini merupakan lanjutan dari sekolah menengah sebelumnya, yakni MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Lama belajar disekolah ini selama tiga tahun (Fakhriansyah & Patoni, 2019: 132). Namun ada juga sumber lain seperti tulisan I. Djumhur dan H. Danasuparta, bahwa lama pendidikan yang ditempuh disekolah ini yakni selama lima tahun (Djumhur & Danasuparta, 1974: 145). Kemudian kita juga mengetahui AMS dan juga HBS merupakan sekolah yang sama-sama dalam golongan Sekolah Menengah Atas, lantas bagaimana perbedaan atau adakah perbedaan dari keduanya? Jelas ada, perbedaan dari keduanya yakni AMS diperuntukkan bagi golongan-golongan penduduk pribumi atau bumiputra, sedangkan HBS lebih diperuntukkan bagi mereka dari golongan Belanda.

Selanjutnya yakni pendidikan tinggi. Hal yang penting untuk digaris bawahi adalah bahwa padanya pendidikan tinggi sekaligus perkembangannya merupakan tahap akhir dan juga pelengkap dari sistem pendidikan era Kebijakan Politik Etis di Hindia Belanda (Nasution, 1983: 144). Adapun untuk pendidikan tinggi atau sekolah tinggi yakni *pertama* adalah STOVIA (*School Tot Opleiding Voor Inlandsche Arsten*). Sekolah ini pada awalnya merupakan Sekolah Dokter Jawa, yang kemudian berkembang dan berubah namanya menjadi STOVIA (*School Tot Opleiding Voor Inlandsche Arsten*) atau lebih dikenal sebagai Sekolah Dokter Bumiputera. Lulusannya disebut *Indisch Arts* (Simbolon, 2006: 241–242). Lama belajar disekolah ini dapat ditempuh selama tujuh tahun, dan hanya

menerima lulusan dari ELS (*Europese Lagere School*) atau yang sederajat. Namun, mereka juga diharuskan menempuh pendidikan pada tingkat persiapan dulu selama dua atau tiga tahun, baru kemudian melanjutkan ke bagian kedokteran (Cahyanti, 2019: 404).

Kedua, OSVIA (Opleidingschole voor Inlandsche Ambtenaren). Sekolah ini pada mulanya bernama *Hoofdenschool* yang merupakan sekolah pendidikan calon-calon pegawai. Perubahan nama ini terjadi pada tahun 1900 menjadi OSVIA (*Opleidingschole voor Inlandsche Ambtenaren*). Sekolah ini didirikan bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai bumiputera. Syarat-syarat atau ketentuan untuk dapat masuk disekolah ini adalah mereka yang berhasil lulus dari sekolah-sekolah rendah Belanda, serta lama belajar yang harus ditempuh di sekolah ini adalah selama lima tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1927 terjadi sebuah reorganisasi atau perubahan, semula yang lama belajarnya selama lima tahun, kemudian berubah menjadi tiga tahun dan peserta didiknya merupakan tamatan atau lulusan dari MULO, jadi sudah berbeda dengan sebelumnya yang hanya menerima dari sekolah rendah Belanda saja, namun kini sudah berbeda. Namanya pun juga berubah menjadi MOSVIA (*Middelbare Opleidingsschool voor Inlandse Ambtenaren*) (Djumhur & Danasuparta, 1974: 133). Dalam sumber lain yang terbaru juga menyebutkan sama, bahwa OSVIA (*Opleidingschole voor Inlandsche Ambtenaren*) merupakan sekolah untuk mendidik para pribumi untuk menjadi pegawai-pegawai atau pamong pribumi (Fakhriansyah & Patoni, 2019: 133).

Ketiga, NIAS (Nederlands Indische Artsen School). Sekolah ini didirikan pada tanggal 1 Juli 1914 di Surabaya. Tergolong menjadi Sekolah Dokter

Hindia Belanda dan bertujuan untuk mendidik serta melatih para calon dokter agar siap terjun langsung untuk melayani kesehatan masyarakat (Nasution, 1983: 145). Di dalam sumber terbaru yang ditulis oleh Fakhriansyah dan Patoni juga menjelaskan sama, bahwa sekolah ini merupakan sekolah kedokteran yang didirikan di Surabaya (Fakhriansyah & Patoni, 2019: 133). Lama belajar yang harus ditempuh disekolah ini yakni selama tujuh tahun (Radiopoetro, 1976: 145). Mereka yang berhasil lulus dari sekolah ini, langsung siap membantu dalam melayani kesehatan di masyarakat.

Sampai pada bagian terakhir yakni sekolah tinggi atau perguruan tinggi tersebut menjadi bagian terakhir dari pembahasan penelitian ini, sebenarnya masih sangat banyak hal-hal atau pendidikan (sekolah-sekolah) yang perlu untuk dibedah, dikaji atau digali lagi, seperti halnya pendidikan-pendidikan bagi para calon guru, kemudian juga sekolah-sekolah kejuruan seperti pertukangan, teknik, pertanian, perniagaan, dan lainnya. Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti yakni keterbatasan waktu, maka peneliti hanya bisa membedah atau mengkaji sistem pendidikan dasar, lanjutan, serta pendidikan tinggi saja. Maka dari itu harapannya di dalam penelitian lain, peneliti bisa mengkaji hal-hal tersebut, serta berharap ada peneliti lain yang juga bisa membahas atau mengkaji hal itu.

KESIMPULAN

Sistem pendidikan Hindia Belanda pada masa Kebijakan Politik Etis tersebut ternyata sudah disusun secara rapi dan terstruktur oleh pemerintah. Mulai dari sekolah-sekolah dasar, lanjutan, hingga sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Walaupun memang pemerintah kolonial

Belanda masih ada sistem diskriminasi atau membeda-bedakan penduduk pribumi dengan golongan-golongan Eropa (Belanda), namun mereka dari kalangan pribumi atau penduduk asli Hindia Belanda pada kenyataannya juga banyak memiliki prestasi dan mereka mendapat pekerjaan yang baik, serta beberapa orang bahkan menjadi tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa pergerakan nasional. Ini menandakan, bahwa sistem pendidikan kala itu memang menghasilkan hasil yang signifikan baik, tapi juga sebaliknya ada dampak negatif juga, yakni semua pendidikan yang telah disusun pemerintah tentu ada maksud tersendiri demi keuntungan Belanda. Akan tetapi, secara hampir keseluruhan setidaknya rakyat pribumi dapat mengemban pendidikan dengan sistem gaya barat, yang mana sistem pendidikan ini merupakan sistem pendidikan yang modern. Setiap lulusan dari sekolah-sekolah maupun itu Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II juga sama-sama memiliki lulusan-lulusan yang baik serta dapat merasakan pendidikan yang selama ini telah mereka nantikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, O. H. (1903). *Peringatan Hari Ulang Tahun ke- 50 THHK Surabaya*. THHK Surabaya.
- Alian, S. (2012). *Metodologi Sejarah Dan Histiografi*. Proyek SP4 Universitas Sriwijaya.
- Brooshooft, P. (n.d.). *Memorie Over Den Toestand in Indie*. ten begeleiding van den open brief op 7 Maart 1888 door 1255 ingezetenen van Nederlandsch Indie gezonden aan 12 Nederlandsche Heeren.
- Cahyanti, H. (2019). Perkembangan Sekolah Kedokteran STOVIA di Batavia 1902-1927. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 4(3), 399–412.
- Djumhur, I., & Danasuparta, H. (1974). *Sejarah Pendidikan*. Penerbit CV ILMU Bandung.

- Dwianti, I. N., Julianti, R. R., & Rahayu, E. T. (2021). Pengaruh Media PowerPoint dalam Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Aktivitas Kebugaran Jasmani Siswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(4), 675–680. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5335922>
- Fahrozy, F. P. N., Iskandar, S., Abidin, Y., & Sari, M. Z. (2022). Upaya Pembelajaran Abad 19-20 dan Pembelajaran Abad 21 Di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 3094–3101. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2098> ISSN
- Fahrudin, & Nurhakim, H. A. (2022). Proxy War dalam Konflik Yaman. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/istoria.v18i1>
- Fakhriansyah, M., & Patoni, I. R. P. (2019). Akses Pendidikan Bagi Pribumi Pada Periode Etis (1901-1930). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 122–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPS.082.03>
- Gouda, F. (2007). *Dutch Cultures Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*. Serambi.
- Hendri. (2017). Kebijakan Politik Pendidikan Tinggi Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia (1920-1942). *Diakronika*, 17(1), 32–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/14>
- Jannah, R. N., Sumardi, & Umamah, N. (2018). Education During National Movement In Java 1908-1928. *Jurnal Historica*, 2(2), 128–141.
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2021). Peranan Sarekat Islam (SI) Dan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik Dan Pendidikan Pada Masa Pergerakan Nasional. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 7(2), 82–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30870/candrasangkala.v7i2.3669>
- Kartodirdjo, S., Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Nasution. (1983). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara.
- Putra, P. (2019). Praktik Informasi Sebagai Upaya Propaganda Program

Kolonisasi Pada Masa Hindia Belanda. *Bibliotech: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4(1), 19–34.
<https://doi.org/10.33476/bibliotech.v4i1.923>

Radiopoetro. (1976). Sejarah Pendidikan Dokter di Indonesia. *Journal of the Medical Sciences (Berkala Ilmu Kedokteran)*, 8(4), 141–150.

Simbolon, P. T. (2006). *Menjadi Indonesia*. Penerbit Kompas.

Sultani, Z. I. M., & Kristanti, Y. P. (2020). Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Di Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20. *Jurnal Artefak*, 7(2), 91. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i2.3518>

Sumanto, W., & F.X, S. (1983). *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Usaha Nasional.

Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403–416.
<https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1531>

Wiranata, P., Safitri, S., & Sair, A. (2018). Perkembangan Pendidikan Di Palembang Pada Tahun 1942-1950 (Sumbangan Materi Pembelajaran Mata Kuliah Sejarah Pendidikan). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(1), 1–13.

Yudi, L. (2012). *Negara Paripurna*. Gramedia Pustaka Utama.